KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

RINGKASAN
DRAFT RENSTRA
2015-2019
Kementerian Komunikasi dan Informatika

Daftar Isi

1. Program utama Kemkominfo 3
2. Sasaran Strategis 4
3. Tantangan dan Potensi 5
4. Strategi 14

Program Utama Kemenkominfo

Berdasarkan nawacita dan agenda pembangunan nasional yang memberikan manfaat signifikan bagi rakyat dan negara

A

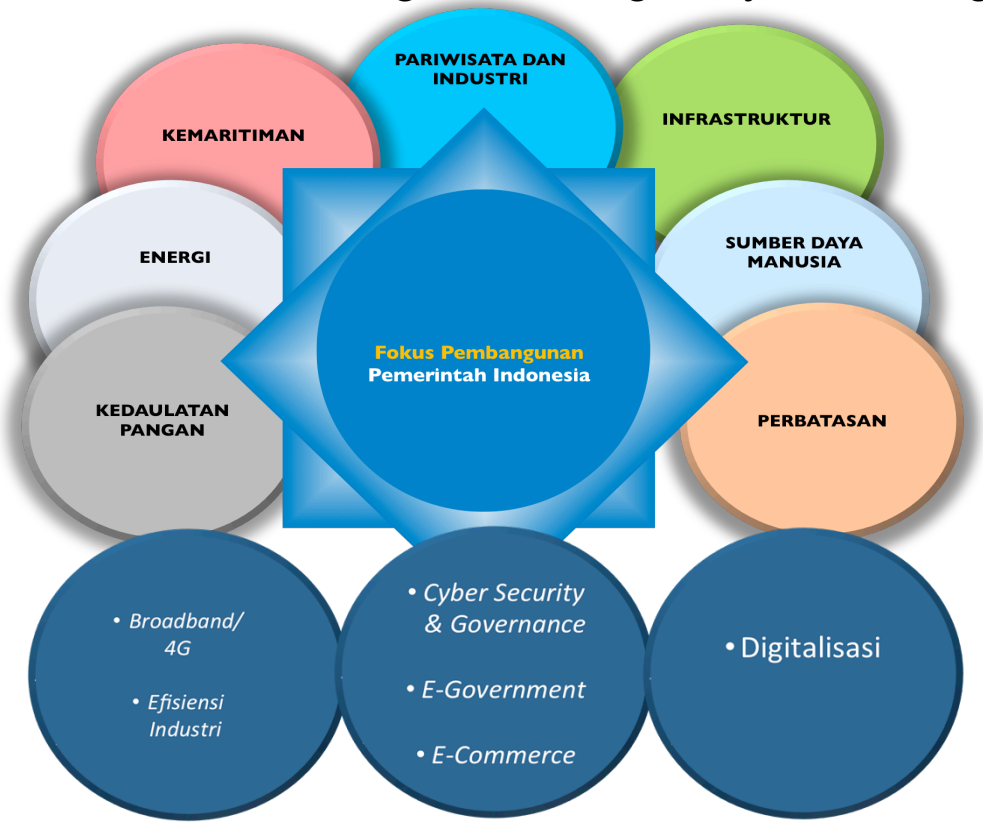

B

- *Broadband/ 4G*
- *Efisiensi Industri*
- *Cyber Security & Governance*
- *E-Government*
- *E-Commerce*
- Digitalisasi

C1

Program Legislasi Nasional (RUU)

- RUU Revisi atas UU 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- RUU Tentang Radio Televisi Republik Indonesia
- RUU Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE

C2

Program Internal Kominfo terkait Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental

Program-program diatas merupakan program utama Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendukung fokus pembangunan nasional. Program-program lain diluar program utama diatas yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika tetap dilaksanakan.

SASARAN STRATEGIS

Program Utama Kemenkominfo

A

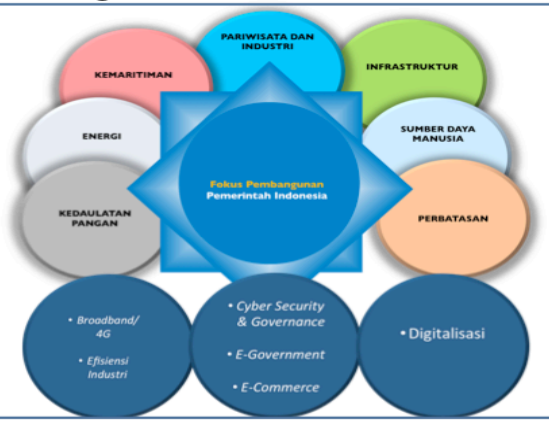

B

- *Broadband/ 4G*
- *Efisiensi Industri*
- *Cyber Security & Governance*
- *E-Government*
- *E-Commerce*
- Digitalisasi

C1

Program Legislasi Nasional (RUU)
- RUU Revisi atas UU 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- RUU Tentang Radio Televisi Republik Indonesia
- RUU Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE

C2

Program Internal Kominfo terkait Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental

A Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan

B Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan

C1 Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman

C2 Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

Program-program diatas merupakan program utama Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendukung fokus pembangunan nasional. Program-program lain diluar program utama diatas yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika tetap dilaksanakan.

A

Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia

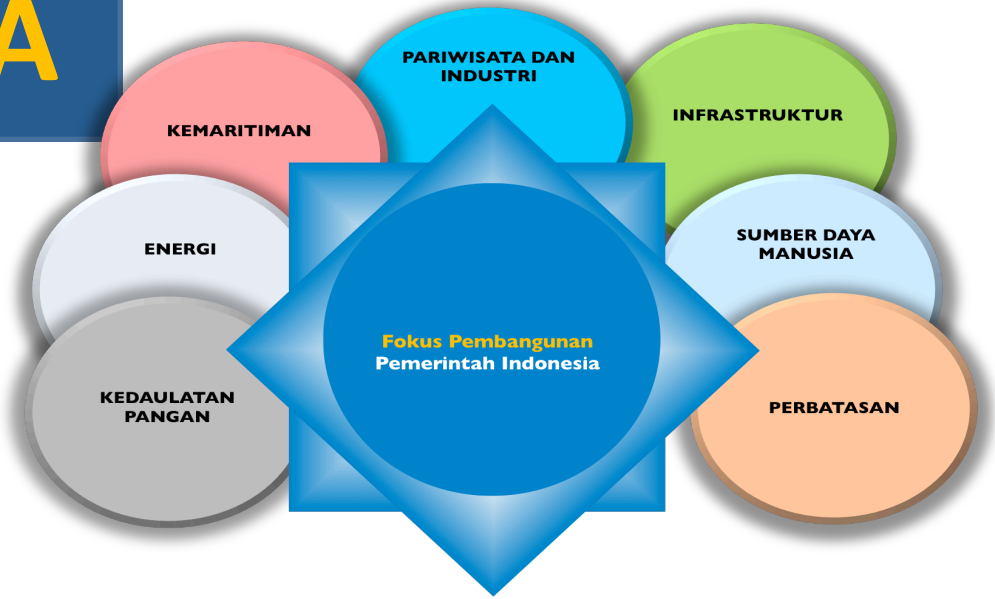

TANTANGAN DAN POTENSI

Program Kemkominfo yang mendukung <u>seluruh fokus</u> pembangunan pemerintah Indonesia

#1 KONEKTIVITAS BROADBAND NASIONAL

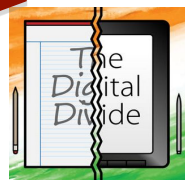

Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Indonesia

Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi

135 Kab/kota

Belum terjangkau jaringan infrastruktur broadband (Palapa Ring)

Sumber: RPJMN 2015-2019

#2 GOVERNMENT PUBLIC RELATION

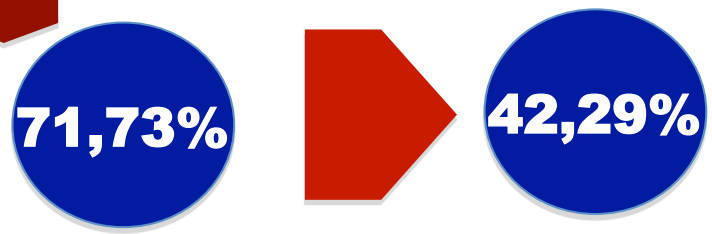

Turunnya citra Pemerintah di mata masyarakat terkait kinerja hasil-hasil pembangunan

Sumber: Survei LSI, Agt '14 dan Jan '15

#3 REVOLUSI MENTAL

REVOLUSI MENTAL

Intoleransi dan krisis kepribadian bangsa

Program-program diatas merupakan program utama Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendukung fokus pembangunan nasional. Program-program lain diluar program utama diatas yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika tetap dilaksanakan.

A Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia

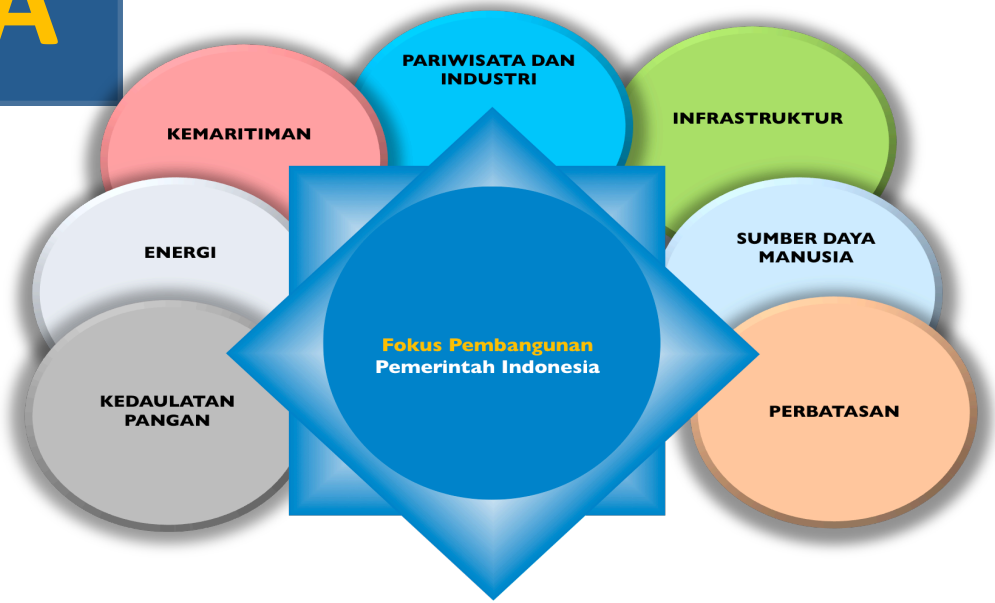

Fokus Pembangunan Daerah Perbatasan

187

Kecamatan (lokasi prioritas) di perbatasan:
- Akses masyarakat masih terbatas terhadap informasi
- Terbatasnya sarana dan prasarana telekomunikasi dan penyiaran.

Sumber: BNPP

- Menurunnya Nasionalisme
- Keterbatasan mendapatkan informasi ttg Negara Indonesia
- Menurunnya tingkat kesejahteraan

TANTANGAN DAN POTENSI

4 Fokus dari pembangunan yang memerlukan dukungan program USO (3T): Kedaulatan Pangan, Kemaritiman, SDM, dan Perbatasan

10.473

Fokus Pembangunan SDM

- ❑ SMK dan SMU memerlukan ketersediaan akses internet.
- ❑ Pemberdayaan TIK melalui e-literasi

Sumber: Kemdikdasbud

5.232

Fokus Pembangunan Kedaulatan Pangan

Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan (BP3K) sebagai pusat data dan informasi pertanian di wilayah kecamatan memerlukan ketersediaan jaringan internet

Sumber: Surat Kementerian Pertanian, 6 Feb 2015

230 ribu

Fokus Pembangunan Kemaritiman

Nelayan dengan muatan perahu kecil < 30 GT, belum dilengkapi dengan radio keselamatan ketika berada di tengah laut

Sumber: Kementerian KKP

Program-program diatas merupakan program utama Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendukung fokus pembangunan nasional. Program-program lain diluar program utama diatas yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika tetap dilaksanakan.

B

Program Kerja Kemenkominfo sebagai *Leading Sector*

TANTANGAN DAN POTENSI

#1 BROADBAND INFRASTRUCTURE INCLUDING 4G

Harga Layanan Pita Lebar masih tinggi

7,4% dari PDB per kapita Indonesia

Sebagai perbandingan, di negara maju harga layanan pita lebar **< 3%** PDB/ kapita

Sumber: Perpres 96/2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia

Kontribusi Broadband terhadap Ekonomi

1% Penetrasi *fixed broadband*

8,6% Penurunan pengangguran

Sumber: Katz el. Al (2009)

10% Penetrasi *Broadband*

1,38% *Pertumbuhan ekonomi*

Sumber: World Bank

Sumber Daya Spektrum

Th. 2019 → Kebutuhan 350 Mhz

Sumber: Ditjen SDPPI, Kemenkominfo

Penataan 4G LTE → Akan menghemat biaya infrastruktur secara signifikan

Penataan 4G LTE 700 Mhz →
- GDP
- APBN
- Lapangan Kerja

Program-program diatas merupakan program utama Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendukung fokus pembangunan nasional. Program-program lain diluar program utama diatas yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika tetap dilaksanakan.

B

Program Kerja Kemenkominfo sebagai *Leading Sector*

TANTANGAN DAN POTENSI

#1 BROADBAND INFRASTRUCTURE INCLUDING 4G (Lanjutan)

Filling Satellite

Meningkatkan fungsi dan aktivitas sektor telekomunikasi, ekonomi dan pertahanan.

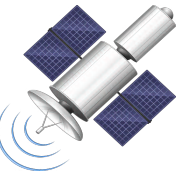

- ❑ ruang angkasa termasuk slot orbit geostationer (GSO) tidak dapat dijadikan objek kepemilikan oleh negara
- ❑ Indonesia dapat kehilangan hak menggunakan slot orbit *(Filling Satellite)* yang didaftarkan ke ITU jika tidak betul-betul menggunakan dan tidak ada *real satellite* secara fisik

Palapa Ring

135 Kab/kota

Belum terjangkau jaringan infrastruktur *broadband.*

Sumber: RPJMN 2015-2019

Nusantara Internet Exchange (NIX)

19 NIX

19 NIX di 19 provinsi belum dimanfaatkan secara optimal .
Fungsi utama NIX untuk meningkatkan kecepatan layanan internet, mengurangi biaya trafik internet nasional dan internasional sampai ke wilayah pelayanan universal telekomunikasi.

#2 EFISIENSI INDUSTRI

Konsolidasi Telco

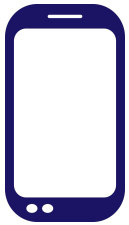

- ❑ Industri telekomunikasi di Indonesia sudah jenuh dengan tingkat persaingan tinggi.
- ❑ Kualitas layanan yang diterima masyarakat semakin menurun.
- ❑ Harga layanan broadband masih diatas 5% dari UMR

Sumber: RPJMN 2015 – 2019

Passive Infrastructure Sharing

Belum efisiennya infrastruktur telekomunikasi nasional.

Pendapatan sektor telekomunikasi tidak terdistribusi ke daerah-daerah.

e-Licensing Spektrum Radio

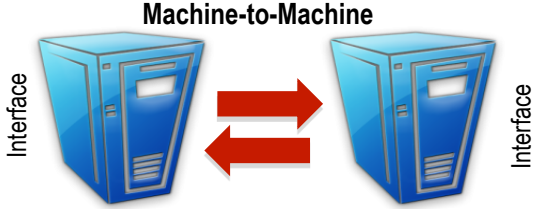

Proses perizinan Izin Spektrum Radio (ISR) masih tergolong lambat, akurasi data masih rendah, dan masih terdapat campur tangan manusia.

Sumber: Ditjen SDPPI, Kemkominfo

Program-program diatas merupakan program utama Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendukung fokus pembangunan nasional.
Program-program lain diluar program utama diatas yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika tetap dilaksanakan.

B

Program Kerja Kemenkominfo sebagai *Leading Sector*

TANTANGAN DAN POTENSI

#2 EFISIENSI INDUSTRI (Lanjutan)

Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

20% Subscriber Station (SS)

30% Base Station (BS)

Impor alat dan perangkat telekomunikasi **Th. 2014** → **67 T**

Sumber: BPS, 2014

Dampak masih tingginya impor

- ❑ Salah satu pemicu Defisit Neraca Perdagangan Indonesia
- ❑ Hilangnya potensi penciptaan lapangan kerja → *(produksi alat dan peragkat telekomunikasi di LN)*

Dampak positif Kebijakan TKDN

- ❑ kemandirian pengembangan teknologi telekomunikasi serta mendorong perkembangan industri dalam negeri agar mampu bersaing di tingkat nasional, regional, ataupun internasional
- ❑ meningkatkan penggunaan produk dalam negeri
- ❑ memicu peluang usaha di industri kreatif
- ❑ Keberpihakan Negara kepada industri telekomunikasi dalam negeri (Negara hadir)

#3 SINGLE EMERGENCY NUMBER

Belum terintegrasinya nomor panggilan untuk menghadapi keadaan darurat.

110/118/ 113/ 115 ???

Kebingungan dan ketidaktahuan masyarakat akan nomor panggilan darurat yang harus dihubungi

#4 PENATAAN REGISTRASI PRABAYAR

1,2 T

Pencegahan **SPAM** dan **FRAUD** layanan telekomunikasi.

Kerugian operator telekomunikasi per tahun akibat Refiling Trafik Terminasi Internasional (RTTI).

Sumber: Ditjen PPI, Kemkominfo

#5 REGISTRASI IMEI

> 10 Juta Unit → **50 T** → **5 T**

Jumlah ponsel ilegal baru

Transaksi industri ponsel per tahun.

Potensi pendapatan negara yang hilang dari PPN per tahun.

Sumber: APSI

Program-program diatas merupakan program utama Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendukung fokus pembangunan nasional. Program-program lain diluar program utama diatas yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika tetap dilaksanakan.

B

Program Kerja Kemenkominfo sebagai *Leading Sector*

TANTANGAN DAN POTENSI

#1 CYBER SECURITY & GOVERNANCE

3,9 Juta Jumlah serangan di dunia maya pada tahun 2013.

Situs go.id Situs yang paling banyak diserang pada tahun 2013 di Indonesia

Belum ada rujukan standarisasi security untuk sektor strategis (Industri, listrik, gas, dan lain sebaginya)

Sumber: ID-SIRTII

#2 E-COMMERCE

- ❑ Jumlah pengguna internet aktif di Indonesia 73 juta pengguna.
- ❑ 7% dari pengguna internet yang bertransaksi jual beli melalui internet.

$12 Miliar (150 T) Nilai transaksi e-commerce pada tahun 2014

$24 Miliar (300 T) Target pemerintah untuk transaksi sampai dengan 2016

Sumber: Menkominfo, kominfo.go.id

#3 DOMAIN NAME SYSTEM (DNS)

- ❑ Maraknya konten ilegal, berbahaya dan malware
- ❑ Meningkatkan *governance* dalam upaya menangani maraknya konten ilegal, berbahaya dan malware
- ❑ Meningkatkan database situs dan kecepatan internet.

Sumber (APJII, Pandi)

#4 E-GOVERNMENT

Belum terintegrasinya database dan layanan e-government instansi pemerintah pusat dan daerah.

Sumber: RPJMN 2015-2019

Program-program diatas merupakan program utama Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendukung fokus pembangunan nasional. Program-program lain diluar program utama diatas yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika tetap dilaksanakan.

B

Program Kerja Kemenkominfo sebagai *Leading Sector*

TANTANGAN DAN POTENSI

DIGITALISASI

Efisiensi Penggunaan Spektrum Frekuensi

Efisiensi Infrastruktur Industri Penyiaran

Peluang Usaha Baru Bagi Penyedia Konten

Diperolehnya digital dividend yang dibutuhkan untuk membangun masyarakat broadband

Kualitas Penerimaan Siaran bahkan dengan Definisi Tinggi (*High Definition*)

79% Biaya Modal (CAPEX)

57% Biaya Operasional (OPEX)

94% Hemat Biaya Listrik

Sumber: Ditjen PPI, Kemkominfo

Program-program diatas merupakan program utama Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendukung fokus pembangunan nasional. Program-program lain diluar program utama diatas yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika tetap dilaksanakan.

C1

Program Legislasi Nasional (RUU)

- RUU Revisi atas UU 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- RUU Tentang Radio Televisi Republik Indonesia
- RUU Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE

TANTANGAN DAN POTENSI

UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE

- ❑ Beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) salah satunya Pasal 27 ayat (3) dimana ketentuan penghinaan dan pencemaran nama baik diatur, memang dinilai cukup kontroversional.
- ❑ Perlunya Revisi terbatas terkait dengan ancaman hukuman

UU NO. 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

- ❑ Prinsip *diversity of content & diversity of ownership* belum terwujud
- ❑ Perlunya penyelenggaraan industri penyiaran yang sehat
- ❑ Perlunya kontent siaran yang sesuai dengan karakter bangsa

RUU TENTANG RADIO TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Kehadiran Rancangan Undang-Undang tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RUU RTRI) memiliki kedudukan yang strategis terutama dalam rangka pengembangan lembaga penyiaran publik di tanah air.

Program-program diatas merupakan program utama Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendukung fokus pembangunan nasional. Program-program lain diluar program utama diatas yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika tetap dilaksanakan.

C2 Program Internal Kominfo terkait Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental

TANTANGAN DAN POTENSI

CHANGE MANAGEMENT

- Transformasi rezim perizinan menjadi pelayanan.
- Belum menyeluruhnya implementasi Reformasi Birokrasi di Kemkominfo.
- Partisipasi publik dalam hal kebijakan dan anggaran.
- Meningkatkan kinerja organisasi dan individu.

RISET DAMPAK SOSIAL & EKONOMI IMPLEMENTASI BROADBAND

Belum terdapat riset mengenai dampak sosial dan ekonomi atas perkembangan TIK khususnya broadband

untuk mempersiapkan tenaga kerja dalam menghadapi perkembangan TIK khususnya broadband

RISK BASED INTERNAL AUDIT PROGRAM

Perubahan paradigma sistem pengawasan dari yang bersifat:

Watchdog (mengungkap temuan), reaktif, post-audit, korektif, kaku, dan pasif.

Watchdog (problem solving), proaktif, pre dan post audit, korektif, preventif, prediktif, fleksibel, aktif dan komunikatif.

Program-program diatas merupakan program utama Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendukung fokus pembangunan nasional. Program-program lain diluar program utama diatas yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika tetap dilaksanakan.

A

Program Kominfo Untuk Mendukung Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesiaç

STRATEGI

KONEKTIVITAS BROADBAND NASIONAL (USO)

- ❑ Redesain USO
  1. Menyusun bisnis model redesain
  2. Menetapkan permen tentang redesain USO
- ❑ Penyelenggaraan 3 pilot sistem desa broadband terpadu di desa nelayan, desa pertanian, dan desa pedalaman sesuai 50 lokasi prioritas BNPP
- ❑ Penyelenggaraan sistem desa broadband terpadu (desa nelayan, desa pertanian, dan desa pedalaman) di 50 lokasi prioritas BNPP
- ❑ Membangun 575 BTS di daerah tertinggal, terluar dan terpencil
- ❑ Menyediakan akses internet di 4000 lokasi (sesuai prioritas, seperti 100% sekolah SD-SMA termasuk madrasah)
- ❑ Revitalisasi dan optimalisasi National Internet Exchange (NIX)

GOVERNMENT PUBLIC RELATION

- ❑ Pemerintah sebagai penentu agenda (agenda setting) isu-isu di masyarakat untuk membangun kepercayaan media terhadap pemerintah sebagai sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya
- ❑ Menyediakan dan menyebarkan konten informasi publik ke seluruh Indonesia

REVOLUSI MENTAL

- ❑ Diseminasi Informasi ke seluruh pelosok Indonesia terkait Revolusi Mental

KONEKTIVITAS BROADBAND NASIONAL (Non-USO)

- ❑ Design TIK environment sebagai acuan di area fokus pembangunan
- ❑ Koordinasi lokasi prioritas dengan K/L terkait dengan penyelenggara telekomunikasi
- ❑ Membuat kebijakan yang memberikan insentif kepada operator untuk memusatkan pengembangannya ke lokpri sektor unggulan sesuai model
- ❑ Memfasilitasi dan memonitor implementasi
- ❑ Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDEKA) ke 1000 desa
- ❑ Pembentukan 1500 agen perubahan Internet Cerdas, Kreatif, dan Produktif (i-CAKAP) di daerah perbatasan, tertinggal, dan terluar

Program-program diatas merupakan program utama Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendukung fokus pembangunan nasional. Program-program lain diluar program utama diatas yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika tetap dilaksanakan.

B

Program Kerja Kemenkominfo sebagai *Leading Sector*

STRATEGI

#1 BROADBAND INFRASTRUCTURE INCLUDING 4G

Tercapainya penetrasi fixed broadband menjadi 40%-75% rumah tangga dengan kecepatan 2 Mbps, 50%-80% gedung dengan kecepatan 1 Gbps dan 25% populasi, dan penetrasi internet mobile broadband menjadi 75% populasi sebesar 1 Mbps

Penataan Sumber Daya Spektrum

- ❑ Menata frekuensi dan Implementasi LTE di pita 1800, 2100, 2300,450, 800, 900, 1900
- ❑ Memastikan implementasi pita spektrum frekuensi 700 Mhz sesuai jadwal sehingga tercapai bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan (program Cita Caraka)

Filling Satellite

Notifikasi filing satelit atau slot orbit ke ITU agar tetap menjadi milik/ kendali Indonesia

Palapa Ring

Membangun Palapa Ring di 51 Kab/ Kota sebagai komplemen pembangunan infrastruktur serat optik oleh PT. Telkom
(PT. Telkom membangun 84 kab/kota, total 135 kab/kota)

#2 EFISIENSI INDUSTRI

Konsolidasi Telco

Mendorong operator telekomunikasi untuk berkonsolidasi dalam rangka efisiensi industri telekomuikasi.

Passive Infrastructure Sharing

Membangun infrastruktur pasif bersama di 8 kota (yang disupervisi pemerintah)

e-Licensing Spektrum Radio

Machine to Machine

Melakukan percepatan layanan perizinan Machine to Machine → target bulan Juni tahun 2015 *launching*.

Program-program diatas merupakan program utama Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendukung fokus pembangunan nasional. Program-program lain diluar program utama diatas yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika tetap dilaksanakan.

B

Program Kerja Kemenkominfo sebagai *Leading Sector*

STRATEGI

#2 EFISIENSI INDUSTRI (Lanjutan)

Tingkat Kandungan Dalam Negeri (Tkdn)

Menyusun kebijakan/regulasi TKDN yang mendorong kewajiban vendor untuk menerapkan kebijakan TKDN alat dan perangkat telekomunikasi 30% (SS) dan 40% (BS) pada tahun 2017.

#3 SINGLE EMERGENCY NUMBER

Penyediaaan layanan nomor panggilan tunggal darurat di seluruh kabupaten/kota dengan 10 kabupaten / kota sebagai piloting pada tahun 2015.

#4 PENATAAN REGISTRASI PRABAYAR

Menyusun kebijakan/regulasi tentang tata cara registrasi dan aktivasi kartu prabayar serta tata niaga distribusi kartu prabayar

#5 REGISTRASI IMEI

- ❑ Merumuskan strategi/kebijakan penataan registrasi IMEI untuk perangkat
- ❑ Memastikan kepatuhan dan penegakan hukum pelanggar regstrasi IMEI

Program-program diatas merupakan program utama Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendukung fokus pembangunan nasional. Program-program lain diluar program utama diatas yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika tetap dilaksanakan.

B

Program Kerja Kemenkominfo sebagai *Leading Sector*

STRATEGI

#1 CYBER SECURITY & GOVERNANCE

- ❑ Menyiapkan rujukan standarisasi security untuk sektor strategis
- ❑ Menerapkan Sertifikasi sistem elektronik strategis.
- ❑ Pembentukan Panel untuk penanganan situs bermuatan negatif.
- ❑ Pemberian tanda daftar sistem penyelenggaraan elektronik.
- ❑ Penyusunan dan pengesahan Permen Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dan Permen Lembaga Sertifikasi Keandalan (LSK)

#2 E-COMMERCE

- ❑ Merumuskan *Roadmap e-Commerce* Nasional untuk 5 – 10 tahun ke depan.
- ❑ Melakukan pengumpulan data proliferasi *e-commerce.*
- ❑ Mendorong pengembangan dan peningkatan jumlah *start up company.*

#3 DOMAIN NAME SYSTEM (DNS)

- ❑ Menetapkan Permen tentang DNS Nasional (Tersedianya DNS Nasional).
- ❑ Diharapkan 4 penyelenggara jaringan telekomunikasi sudah menerapkan DNS Nasional pada Q4 2015.
- ❑ Implementasi DNS Nasional secara menyeluruh.

#4 E-GOVERNMENT

- ❑ Menyusun masterplan dan memastikan penetapan perpres e-government sebagai dasar penerapan layanan e-government.
- ❑ Mendorong tercapainya index PeGI Nasional 3,4.
- ❑ Integrasi database dan layanan e-government di instansi pemerintah.

Program-program diatas merupakan program utama Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendukung fokus pembangunan nasional. Program-program lain diluar program utama diatas yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika tetap dilaksanakan.

B

Program Kerja Kemenkominfo sebagai *Leading Sector*

STRATEGI

DIGITALISASI

- ❑ Menyusun kebijakan/regulasi percepatan migrasi TV analog ke digital.
- ❑ Memastikan migrasi TV analog ke digital selesai sesuai jadwal *switch off* (2018).
- ❑ Mendorong percepatan revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang merupakan inisiatif DPR.

Program-program diatas merupakan program utama Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendukung fokus pembangunan nasional. Program-program lain diluar program utama diatas yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika tetap dilaksanakan.

C1

Program Legislasi Nasional (RUU)

- RUU Revisi atas UU 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- RUU Tentang Radio Televisi Republik Indonesia
- RUU Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE

STRATEGI

UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE

- ❑ Konsolidasi naskah akademik tentang UU ITE dengan seluruh stakeholder.
- ❑ Menyampaikan naskah akademik dan RUU perubahan kepada DPR melalui presiden.

UU 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

- ❑ Menyusun naskah akademik dengan melibatkan partisipasi publik dan seluruh stakeholder sebagai bahan pembahasan dengan DPR.
- ❑ Menyusun UU Pelaksana turunan.

RUU TENTANG RADIO TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (RTRI)

Menyusun naskah akademik dengan melibatkan partisipasi publik dan seluruh stakeholder sebagai bahan pembahasan dengan DPR.

Program-program diatas merupakan program utama Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendukung fokus pembangunan nasional. Program-program lain diluar program utama diatas yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika tetap dilaksanakan.

C2 Program Internal Kominfo terkait Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental

STRATEGI

CHANGE MANAGEMENT

- ❑ Launching Budaya Organisasi RB dan pelayanan KOMINFO
- ❑ Menetapkan Permen tentang Pelayanan Publik di lingkungan Kemkominfo, untuk mendorong ASN Kemkominfo agar berorientasi pelayanan
- ❑ Menerapkan implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh di Kemkominfo.
- ❑ Menyusun sistem dan mekanisme partisipasi publik dalam hal kebijakan dan anggaran.
- ❑ Mempercepat proses perizinan di lingkungan Kemkominfo.
- ❑ Memastikan Indeks PeGI Kemkominfo sesuai dengan target rata-rata nasional.

RISET DAMPAK SOSIAL & EKONOMI IMPLEMENTASI BROADBAND

- ❑ Menyusun desain riset, studi literature, dan pemetaan terhadap stakeholder.
- ❑ Analisa dan penyusunan rekomendasi hasil riset terkait kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi dampak broadband

RISK BASED INTERNAL AUDIT PROGRAM

- ❑ Pengawalan terhadap proses pengadaan.
- ❑ Review atau evaluasi atas pengelolaan PNBP dan perizinan.
- ❑ Audit kinerja atas program utama Kemkominfo.
- ❑ Audit atas pengelolaan BMN (termasuk hibah).
- ❑ Pendampingan atas penyusunan Laporan Keuangan.
- ❑ Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal.

Program-program diatas merupakan program utama Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendukung fokus pembangunan nasional. Program-program lain diluar program utama diatas yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika tetap dilaksanakan.

TERIMA KASIH